

**ANALISIS INDIKATOR SOSIAL  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020**

*Penyusun :*

*Arif Budianto*

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2021**

# ANALISIS INDIKATOR SOSIAL KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

---

*Arif Budianto*  
*Statistisi Kabupaten Magelang*

## **LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, memberikan implikasi pada daerah untuk mampu mengemban tanggungjawab dan wewenang, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya upaya menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan sendiri. Hal tersebut memerlukan sebuah langkah komprehensif untuk merestrukturisasi pemerintahan dan pola pembangunan, yang antara lain memerlukan pemerintahan daerah yang kreatif dan inovatif, untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi wilayah agar memberikan hasil yang optimal, diperlukan suatu gambaran yang komprehensif mengenai wilayahnya sendiri. Melalui gambaran wilayah yang tersusun dengan baik, pemerintah daerah dapat menentukan arah perkembangan dan inventarisasi sumber daya yang tersedia pada wilayahnya. Untuk lebih mempermudah informasi gambaran wilayah Kabupaten Magelang secara umum, maka diperlukan suatu sajian data dan informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan analisa dan evaluasi pembangunan.

Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara secara bijaksana. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya peningkatan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Dalam prosesnya, pembangunan berkelanjutan ini mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang memberikan porsi seimbang pada kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan diperlukan indikator dan paramater pembangunan. Untuk itu dibutuhkan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan maupun monitoring yang lebih baik bagi pembangunan daerah terutama kabupaten dan kota.

Tulisan ini mencoba menyajikan beberapa indikator pembangunan khususnya Indikator Sosial Kabupaten Magelang.

## **TUJUAN**

Tujuan dari penyusunan analisis Indikator Sosial ini adalah untuk menyajikan data dan informasi mengenai indikator-indikator sosial di Kabupaten Magelang serta dapat berguna bagi para pengambil keputusan baik di tingkat daerah maupun pusat sebagai sumber informasi dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan berkelanjutan.

## **METODOLOGI**

Analisis perkembangan indikator sosial ini berisi berbagai jenis data yang menggambarkan kondisi Pemerintahan Kabupaten Magelang yang merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah. Data yang disajikan adalah data-data kompilasi yang diperoleh dari organisasi perangkat daerah sampai dengan akhir tahun 2020.

### **I. KEPENDUDUKAN**

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41 km<sup>2</sup>), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km<sup>2</sup>). Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110°01'51"- 110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13"- 7°42'16" Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung.

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada 2020 berdasarkan data registrasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 1.299.859 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (115.834 jiwa), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar, sebanyak 32.397 jiwa. Dari tahun 2010 hingga 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif tiap tahunnya, yakni sebesar 0,93 persen.

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian, penduduk masuk, dan penduduk ke luar. Laju pertumbuhan penduduk negatif menunjukkan bahwa penduduk yang keluar dan berpindah tempat tinggal maupun yang meninggal lebih banyak dibandingkan dengan kelahiran dan

penduduk yang masuk. Laju pertumbuhan penduduk positif menunjukkan bahwa penduduk yang masuk ke wilayah tersebut dan penduduk yang lahir lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang keluar dan pindah.

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasar jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki di Kabupaten Magelang lebih besar daripada persentase penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada 2020 berjumlah 654 989 jiwa atau sebesar 50,39 persen dari total jumlah penduduk, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 644 870 jiwa atau sebesar 49,61 persen.

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2020

Kecamatan Subdistrict	Penduduk/Population			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Annual Population Growth Rate (%) 2010–2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Salaman	37 128	36 843	73 971	1,13
2 Borobudur	31 330	30 879	62 209	1,10
3 Ngluwar	16 134	16 263	32 397	0,79
4 Salam	24 027	24 056	48 083	0,75
5 Srumbung	24 190	24 217	48 407	0,75
6 Dukun	23 259	23 315	46 574	0,79
7 Muntilan	39 987	39 957	79 944	0,64
8 Mungkid	37 248	37 479	74 727	0,82
9 Sawangan	29 092	28 617	57 709	0,71
10 Candimulyo	25 234	24 559	49 793	0,90
11 Mertoyudan	57 497	58 337	115 834	0,96
12 Tempuran	26 358	25 661	52 019	1,11
13 Kajoran	30 173	29 202	59 375	1,39
14 Kaliangkrik	30 338	29 109	59 447	1,25
15 Bandongan	31 185	29 928	61 113	1,11
16 Windusari	26 543	25 093	51 636	1,06
17 Secang	41 348	41 150	82 498	0,96
18 Tegalrejo	27 822	27 216	55 038	0,33
19 Pakis	27 843	26 823	54 666	0,44
20 Grabag	47 022	45 677	92 699	1,25
21 Ngablak	21 231	20 489	41 720	0,92
<b>Kab. Magelang</b>	<b>654 989</b>	<b>644 870</b>	<b>1 299 859</b>	<b>0,93</b>

Sumber : BPS Kab. Magelang

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Dilihat dari kepadatan penduduk per kecamatan secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi, ketersediaan sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Magelang pada 2020 adalah Kecamatan Muntilan, yaitu sebesar 2.794 jiwa per 1 km<sup>2</sup>. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kajoran dengan kepadatan penduduk hanya sebesar 712 jiwa per 1 km<sup>2</sup>. Beberapa kecamatan lain seperti Srumbung, Dukun, Sawangan, Windusari, Pakis dan Ngablak juga mempunyai angka kepadatan penduduk dibawah 1000. Bila diteliti, kecamatan dengan angka kepadatan dibawah 100 merupakan wilayah dengan topografi pegunungan.

Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan, 2020

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Luas (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Salaman	5,69	68,87	1074
2	Borobudur	4,79	54,57	1140
3	Ngluwar	2,49	22,44	1444
4	Salam	3,70	31,63	1520
5	Srumbung	3,72	53,19	910
6	Dukun	3,58	53,41	872
7	Muntilan	6,15	28,61	242794
8	Mungkid	5,75	37,40	1998
9	Sawangan	4,44	72,41	797
10	Candimulyo	3,83	46,93	1061
11	Mertoyudan	8,91	45,35	2554
12	Tempuran	4,00	49,03	1061
13	Kajoran	4,57	83,39	712
14	Kaliangkrik	4,57	57,33	1037
15	Bandongan	4,70	45,78	1335
16	Windusari	3,97	61,62	838
17	Secang	6,35	47,33	1743
18	Tegalrejo	4,23	35,88	1534
19	Pakis	4,21	69,55	786
20	Grabag	7,13	77,18	1201
21	Ngablak	3,21	43,78	953

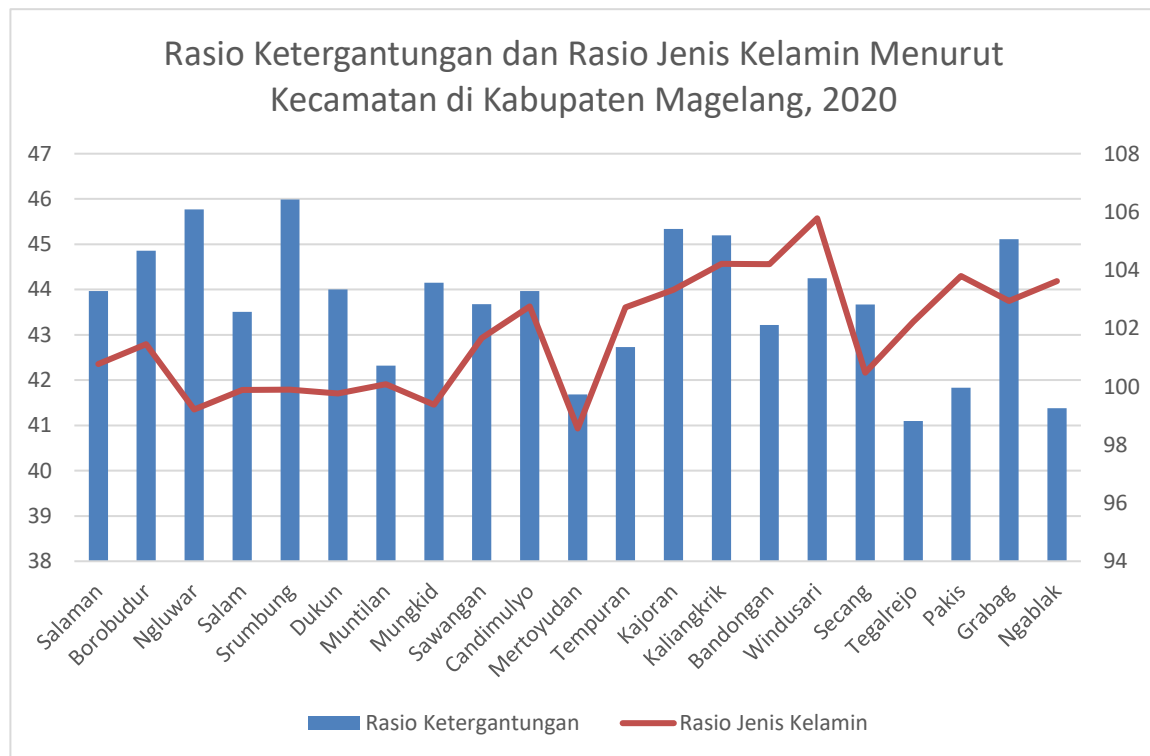
Sumber: DDA 2021

Distribusi penduduk antar wilayah yang tidak merata, bisa menimbulkan beberapa

permasalahan. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

### Angka Beban Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin

Angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan (dependency ratio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Tinggi rendahnya angka beban ketergantungan memberikan indikasi keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Berdasarkan komposisi penduduk menurut usia produktif/nonproduktif didapatkan angka beban ketergantungan penduduk Kabupaten Magelang tahun 2020 sebesar 43,61. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 43 hingga 44 penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas

65 tahun). Rasio ketergantungan tertinggi ada di Kecamatan Srumbung sebesar 45,99 sedangkan terendah di Kecamatan Tegalrejo sebesar 41,10.

Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada waktu tertentu. Sex Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi menurut jenis kelamin. Angka sex ratio dipengaruhi oleh angka kelahiran, migrasi dan kematian berdasarkan jenis kelamin.

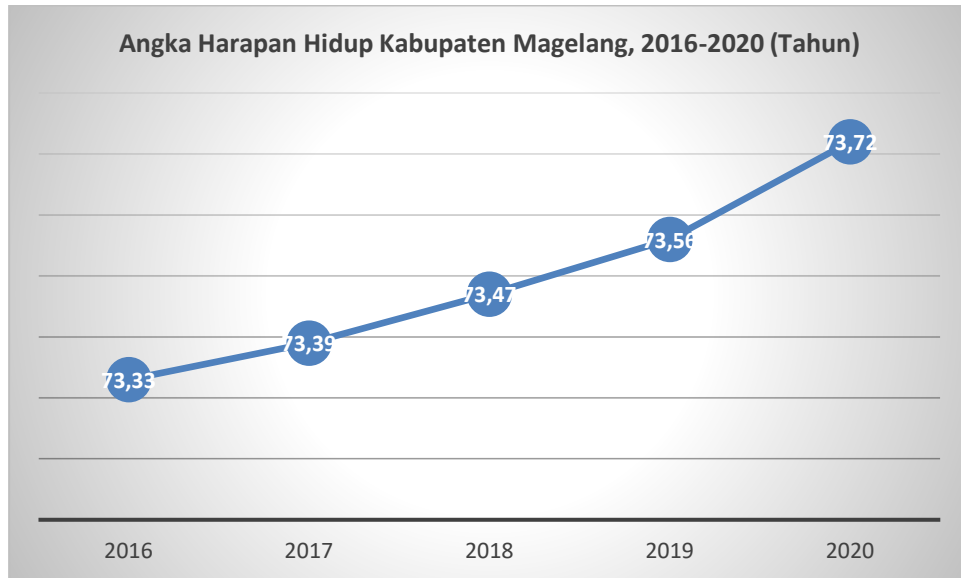
Apabila dilihat dari Rasio Jenis Kelamin (Sex ratio/ RJK), sex ratio Kabupaten Magelang menunjukkan angka 101,57 persen, yang artinya setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 hingga 102 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan rasio jenis kelamin (sex ratio) per kecamatan, Kecamatan Windusari memiliki sex ratio tertinggi, sebesar 105,78 persen, sedangkan sex ratio terkecil berada di Kecamatan Mertoyudan yaitu 98,56 persen. Selain Kecamatan Mertoyudan, beberapa kecamatan lain juga memiliki penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Hal itu ditandai dengan besaran sex ratio yang kurang dari 100. Kecamatankecamatan tersebut adalah Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, dan Mungkid.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sex ratio adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Sex ratio kurang dari seratus menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini bisa disebabkan karena keluarnya penduduk laki-laki ke luar daerah untuk mencari pekerjaan, maupun berpindahnya penduduk perempuan ke dalam suatu wilayah untuk mendapatkan pekerjaan. Kecamatan Mertoyudan dengan tingkat pertumbuhan fasilitas ekonomi, menjadi salah satu faktor penyerap tenaga kerja. Hal ini memungkinkan tenaga kerja perempuan banyak masuk ke wilayah ini, untuk mencari pekerjaan, sehingga sex ratio untuk Kecamatan Mertoyudan kurang dari 100

## **II. KESEHATAN**

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dapat melakukan aktivitas secara produktif dalam proses pembangunan nasional. Apabila angka kesakitan pada penduduk terutama golongan usia produktif di suatu wilayah tinggi, dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Salah satu indikator pembangunan di bidang kesehatan adalah Angka harapan Hidup. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Magelang tetap mengalami peningkatan. Tercatat, selama lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup meningkat 0,22 poin, dari 73,33 pada 2016 menjadi 73,72 tahun pada 2020.



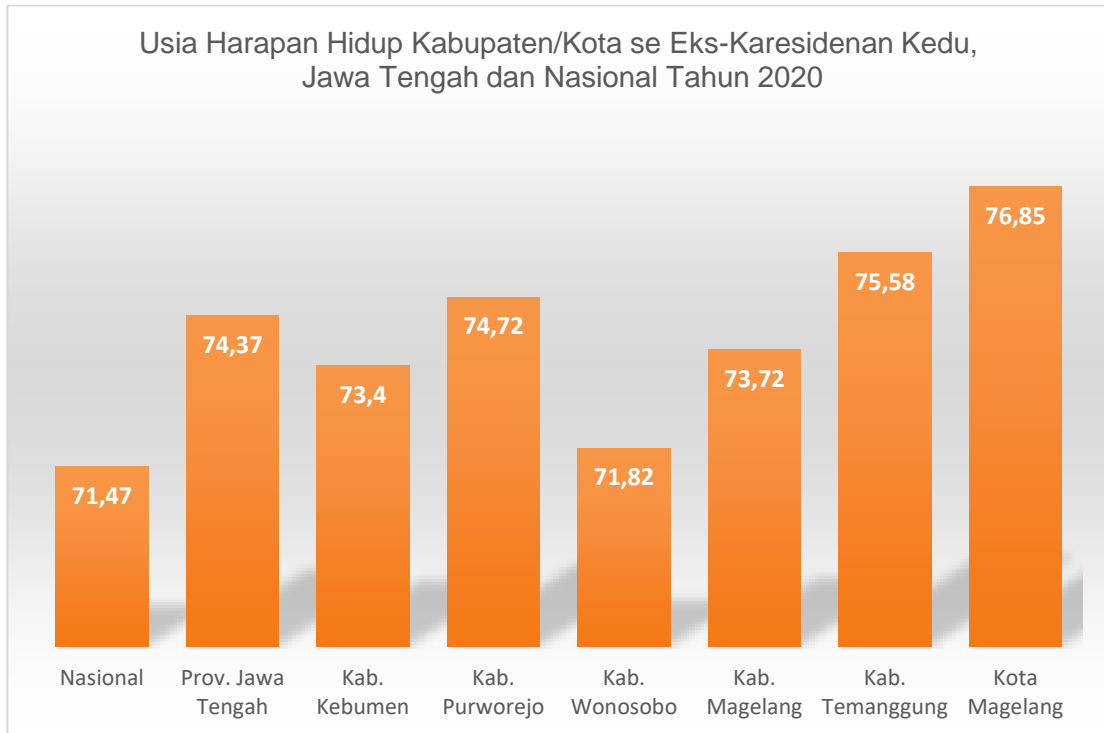
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Magelang

Capaian AHH Kabupaten Magelang selama sepuluh tahun terakhir berada di kisaran 73, yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Magelang akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 73 tahun. Sementara itu, tren AHH yang terus meningkat menunjukkan peluang bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat disebabkan beberapa hal. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat, diduga turut memiliki andil dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat tersebut. Selain itu, faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

Selama 2020, jika dibandingkan secara kewilayahan se-eks Karesidenan Kedu, UHH Kabupaten Magelang menempati posisi ke-4, setelah Kota Magelang, Temanggung, dan Purworejo. Bila dibandingkan dengan Jawa Tengah, Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2020 ternyata masih terpaut cukup banyak, yaitu 0,65 poin.





Usia Harapan Hidup Jawa Tengah pada 2020 mencapai 74,37 tahun. Keteringgalan ini tentunya perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan, terutama pembangunan di bidang kesehatan.

### III. PENDIDIKAN

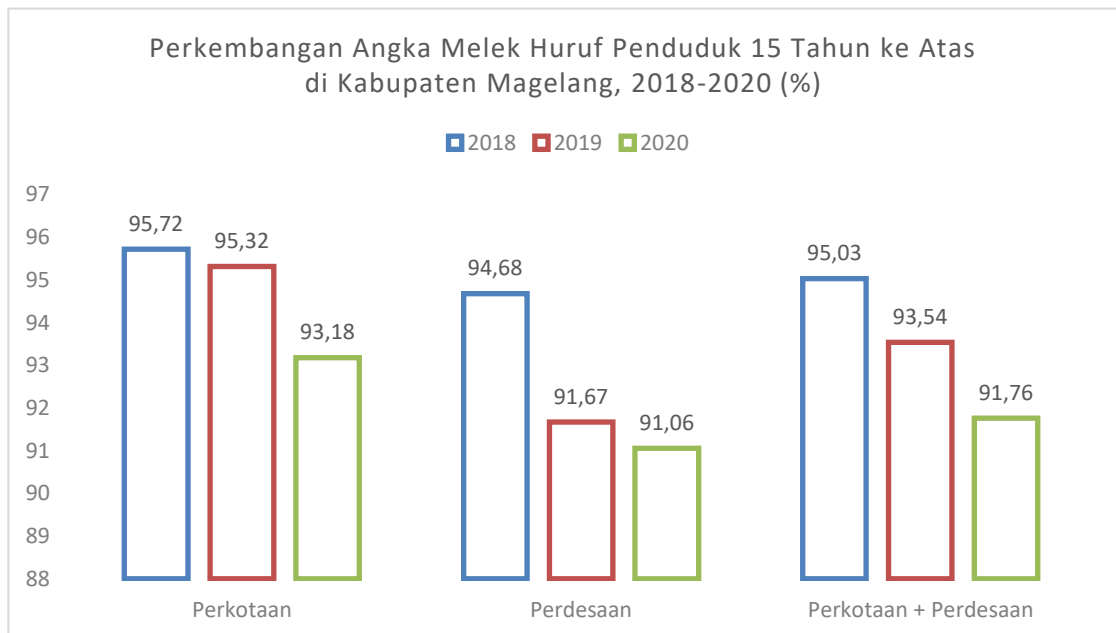
Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur pembangunan di bidang pendidikan adalah Angka Melek Huruf, Tingkat Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), serta Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah.

#### **Angka Melek Huruf (AMH)**

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf

merupakan tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah.

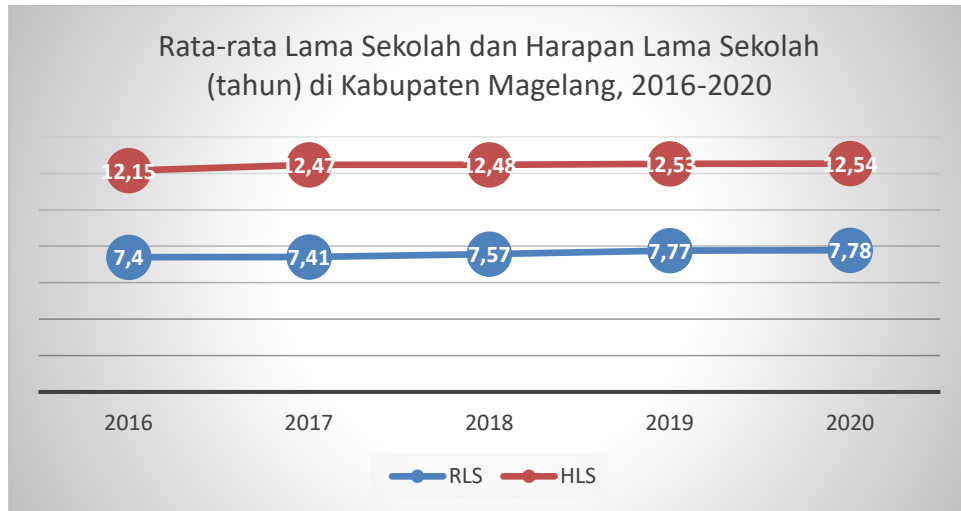


Sumber : BPS

Kondisi keaksaraan di Kabupaten Magelang tahun 2020, secara umum angka melek huruf penduduk pada wilayah perkotaan baik laki-laki maupun perempuan, lebih tinggi dibanding angka melek huruf yang wilayah pedesaan baik laki-laki maupun perempuan.

### **Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah**

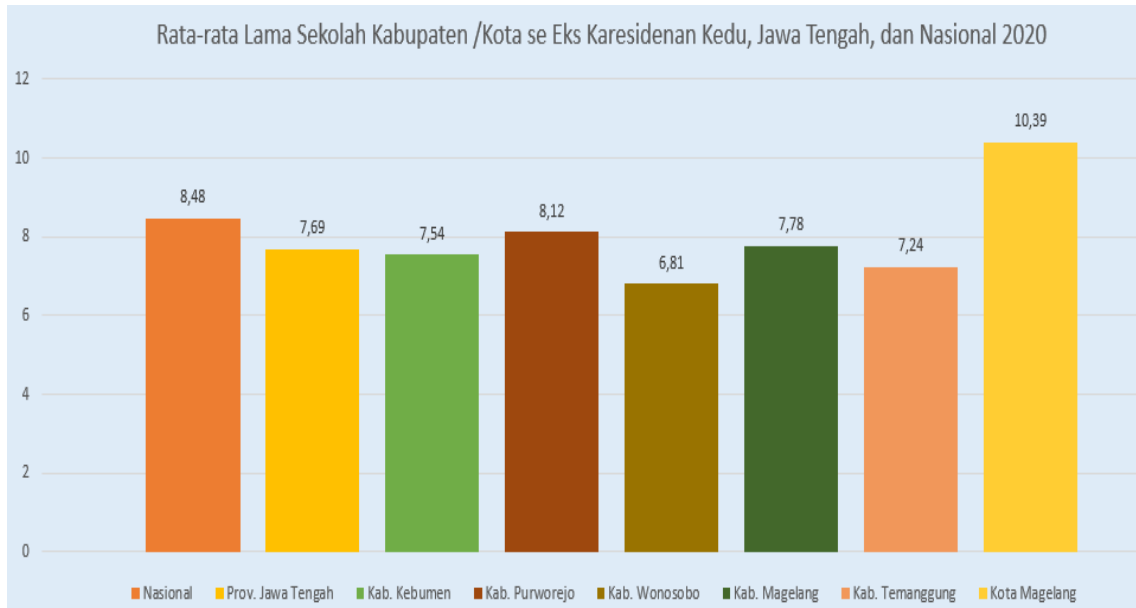
Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 rata-rata lama sekolah sebesar 6,73 tahun. Nilai ini terus mengalami kenaikan di mana di tahun 2020 rata-rata lama sekolah sudah mencapai 7,78 tahun atau setara dengan kelas dua SMP.



Selama periode 2011-2020, indikator ini tumbuh sebesar 15,60 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan mencapai 1,63 persen per tahun.

Di sisi lain, Kabupaten Magelang merupakan kabupaten dengan tingkat kemampuan baca tulis yang tinggi. Tingkat kemampuan baca tulis di Kabupaten Magelang untuk penduduk usia 15 tahun ke atas sudah di atas 90 persen. Akan tetapi, capaian tersebut ternyata belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih panjang. Kondisi ini seharusnya menyadarkan kita, terutama para pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk terus mengusung isu strategis bidang pendidikan sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Magelang.

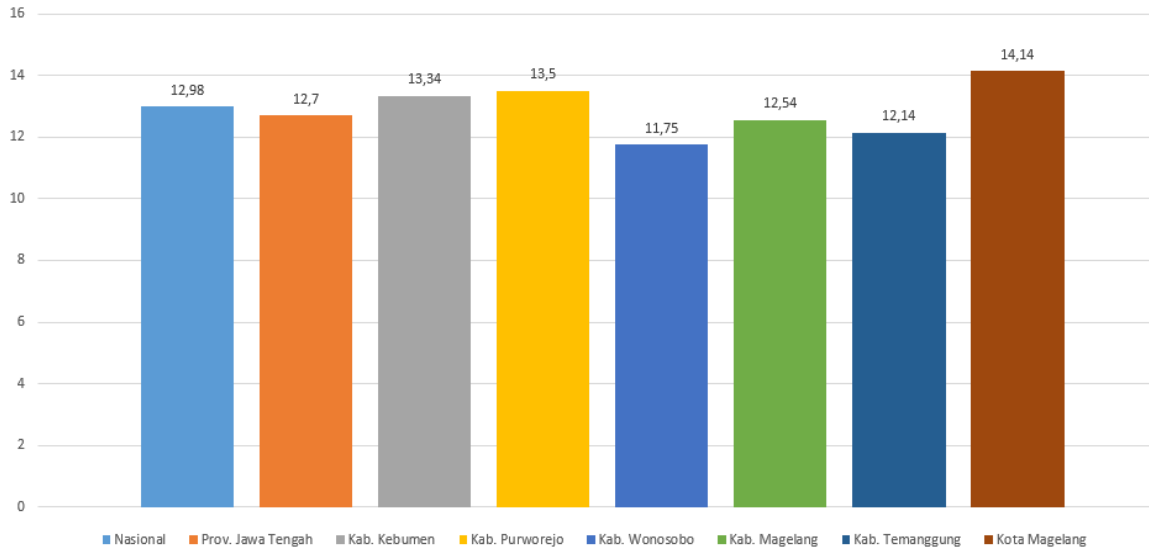
Bila dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota se-Karesidenan Kedu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk di Kabupaten Magelang tahun 2020 berada pada urutan ketiga, setelah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Dengan capaian sebesar 7,78 tersebut, ternyata Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Magelang masih di bawah capaian nasional yang sebesar 8,48. Capaian masing-masing indikator pada Dimensi Pendidikan di Kabupaten Magelang tidak jauh berbeda dengan capaian provinsi maupun nasional, sama-sama mengalami peningkatan capaian. Namun patut disayangkan, meskipun capaian pada dimensi ini terus meningkat, besarnya masih di bawah angka nasional.



Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada kurun waktu 2016 hingga 2020, angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang meningkat sebesar 0,39 poin, menjadi 12,54 tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang memberi sinyal positif, bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang telah mencapai 12,54, yang artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se-eks Karesidenan Kedu, HLS Kabupaten Magelang lebih rendah dari kabupaten/kota yang memiliki IPM lebih tinggi dari Kabupaten Magelang, yaitu Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo yang di atas 13 tahun. Bahkan Kabupaten Kebumen yang nilai IPM nya lebih rendah dari Kabupaten Magelang memiliki HLS di atas 13 tahun, lebih tinggi daripada Kabupaten Magelang.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, Jawa Tengah dan Nasional  
Tahun 2020



## Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid guru, rasio guru sekolah, dan rasio murid kelas.

Rasio guru-murid adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Rasio sekolah-murid adalah rasio murid per sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antar jumlah murid dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan sekolah di suatu daerah.

Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan sekolah makin tinggi. Pada umumnya terdapat suatu pola bahwa makin tinggi jenjang pendidikan makin padat jumlah murid di sekolah. Kondisi ini juga menunjukkan makin tinggi jenjang pendidikan, makin kurang jumlah sekolahnya. Rasio sekolah-guru adalah rasio tenaga pengajar per sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu. Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu.

Rasio Jumlah Sekolah, Murid, Guru di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2020

Pendidikan	Tahun	Rasio Sekolah - Guru	Rasio Sekolah - Murid	Rasio Guru - Murid
<b>SD / MI</b>	2019	1:9	1:134	1:15
	2020	1:9	1:133	1:15
<b>SMP /MTs</b>	2019	1:17	1:265	1:16
	2020	1:17	1:268	1:16
<b>SMA/SMK/MA</b>	2019	1:24	1:401	1:17
	2020	1:23	1:379	1:16

Sumber: Kemendiknas dan Kemenag

Selama 2 tahun terakhir, rasio guru murid untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA relatif stabil, pada tahun 2020, rasio SD/MI adalah 15, artinya setiap 1 orang guru mengampu 15 murid SD/MI. Rasio SMP/MTs sebesar 16 artinya setiap 1 orang guru mengampu 16 murid SMP/MTs, dan rasio SMA/SMK/MA sebesar 16 artinya 1 orang guru mengampu sebanyak 16 murid. Dari tabel diatas juga terlihat, pada tahun 2020 rata-rata setiap sekolah terdapat 9 guru pada jenjang sekolah SD/ sederajat, 17 guru pada jenjang sekolah SMP/ sederajat dan 23 guru pada jenjang pendidikan sekolah SMA/ sederajat. Untuk rasio sekolah murid pada tahun 2020 setiap sekolah rata-rata menampung sebanyak 133 murid pada jenjang SD/ sederajat, 268 murid pada jenjang SMP/ sederajat, dan 379 murid pada jenjang SMA/ sederajat.

#### IV. KETENAGAKERJAAN

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diupayakan memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator yang digunakan dalam pembangunan di sektor ketenagakerjaan diantaranya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha, dan jumlah jam kerja.

Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti sedang menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/ mengharapkan dapat pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah,

mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari pekerjaan

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2019 sebanyak 746 811 orang, sedangkan Tahun 2020 sebanyak 774 364 orang. Kondisi tersebut menunjukkan terjadi penambahan jumlah angkatan kerja sebanyak 27 553 orang atau sekitar 3,69 persen

Penambahan jumlah angkatan kerja mempengaruhi jumlah penduduk yang bekerja dimana ada penambahan sebanyak 17 395 orang dari 723 889 orang yang bekerja di Tahun 2019 menjadi 741 284 di Tahun 2020. Jumlah pengangguran tahun 2020 juga bertambah. Terjadi penambahan 10 158 orang pengangguran dari 22 922 orang di Tahun 2019 menjadi 33 080 di Tahun 2020. Salah satu alasan semakin banyak pengangguran di Tahun 2020 adalah karena adanya Pandemi Covid19 yang melumpuhkan sejumlah usaha dan kegiatan ekonomi di hampir seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Penduduk usia kerja yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif digolongkan dalam kelompok bukan angkatan kerja. Kelompok ini terbagi menjadi tiga, yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan yang melakukan kegiatan lainnya. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja mengalami perubahan yang cukup banyak antara tahun 2019-2020. Di tahun 2019 jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 252 559, sedangkan di Tahun 2020 jumlahnya menjadi 236 501 orang. Perubahan ini sebanding dengan perubahan penduduk kelompok angkatan kerja dimana jumlah di Tahun 2020 lebih banyak dibanding Tahun 2019.

Keterangan	2019		2020	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Angkatan Kerja	427.005	319.806	429.505	344.859
Bekerja	414.566	309.323	408.237	333.047
Pengangguran Terbuka	12.439	10.483	21.268	11.812
Bukan Angkatan Kerja	73.157	179.402	76.531	159.970
Penduduk Usia Kerja	500.162	499.208	506.036	504.829
Angkatan Kerja	427.005	319.806	429.505	344.859
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	85,37	64,06	84,88	68,31
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,91	3,28	4,95	3,43
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	97,09	96,72	95,05	96,57

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah penduduk angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK maka semakin besar juga penduduk yang masuk dalam kegiatan ekonomi produktif maupun yang berusaha masuk dalam kegiatan ekonomi produktif dalam kurun waktu tertentu. TPAK Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebesar 76,60 persen. Angka ini mempunyai arti bahwa

dari 100 orang penduduk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah penduduk angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK maka semakin besar juga penduduk yang masuk dalam kegiatan ekonomi produktif maupun yang berusaha masuk dalam kegiatan ekonomi produktif dalam kurun waktu tertentu. TPAK Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebesar 76,60 persen. Angka ini mempunyai arti bahwa dari 100 orang penduduk.

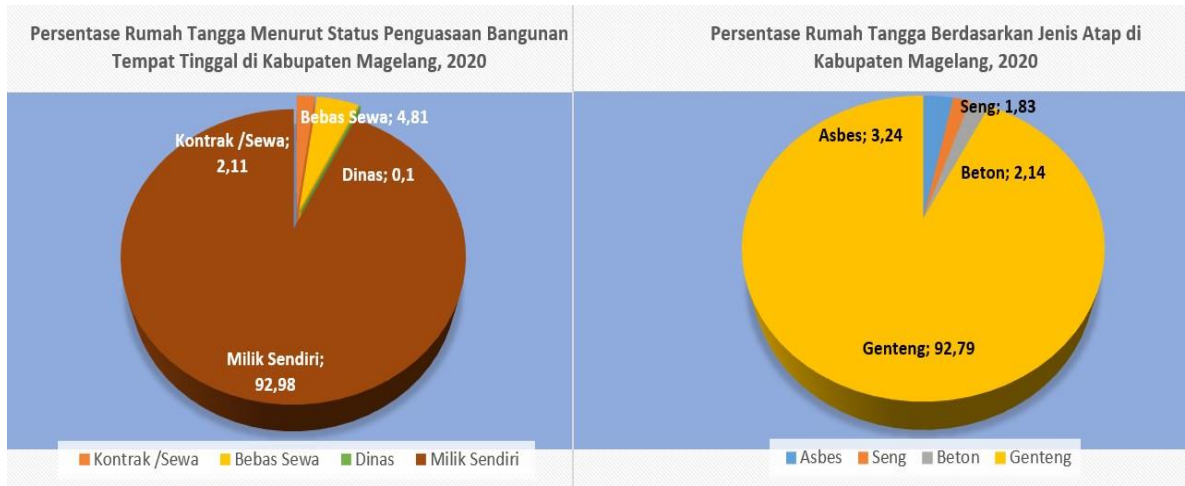
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk angkatan kerja. TPT di Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebesar 4,27 persen. Nilai ini berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat 4 orang penduduk yang menganggur, atau sekitar 33 080 orang menganggur dari 774 364 penduduk angkatan kerja. Sedangkan Tahun 2019 nilai TPT lebih rendah yaitu sebesar 3,07 persen, yaitu sebanyak 22 922 orang menganggur dari 746 811 orang angkatan kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja. TKK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dan sementara tidak bekerja terhadap jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja. TKK di Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebesar 95,73 persen. Angka ini mempunyai arti bahwa dari 100 orang penduduk angkatan kerja, 95 orang mempunyai kegiatan bekerja atau sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu. Sedangkan untuk Tahun 2019 nilainya lebih tinggi yaitu sebesar 96,93 persen.

## **V. PERUMAHAN**

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.





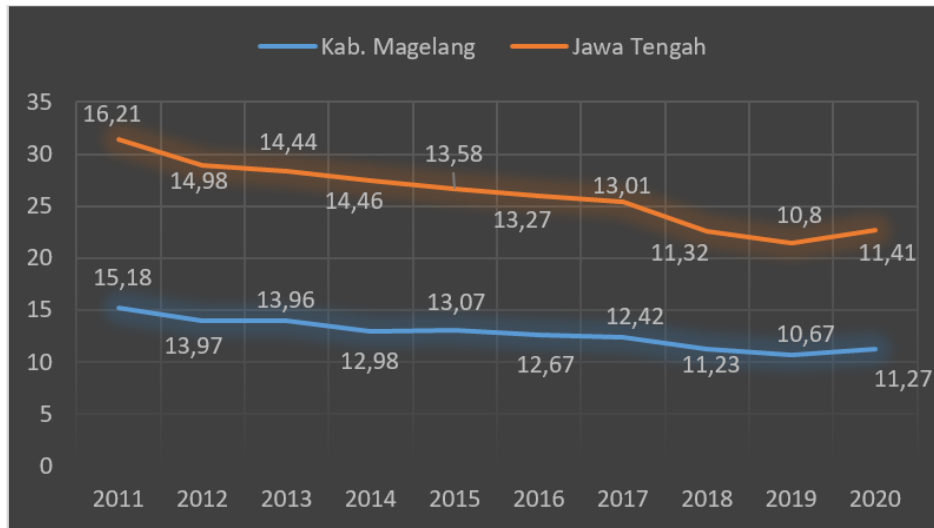
Berdasarkan Susenas 2020, di Kabupaten Magelang terdapat 92,98 persen rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah milik sendiri, sedangkan sisanya, sebesar 7,02 persen bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah namun bukan milik sendiri tersebut terdiri atas 2,11 persen kontrak/sewa, 4,81 persen bebas sewa, dan 0,10 persen dinas/lainnya. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri ini meningkat 2,48 poin dibanding tahun sebelumnya.

Komposisi tempat tinggal rumah tangga di Kabupaten Magelang didominasi oleh atap yang terbuat dari genteng (92,79%), sementara yang terbuat dari asbes sebanyak 3,24% dan sisanya terbuat dari seng dan beton. Penggunaan dinding dari tembok sepertinya merupakan pilihan sebagian besar rumah tangga karena dinding dengan jenis tembok lebih kuat dan lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Dari data BPS, tempat tinggal menggunakan tembok sebanyak 92,01 persen, 6,27 persen menggunakan kayu. Sedangkan sisanya menggunakan anyaman bambu dan lainnya.

## VI. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah. Perubahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat melalui analisis trend tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, perkecualian terjadi kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2014-2015 dan tahun 2019-2020. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang sebesar 146,34 ribu jiwa (11,27 persen), naik dibanding tahun 2019 yang sebesar 137,45 ribu jiwa (10,67 persen). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan penduduk miskin sebesar 0,60 persen atau sebanyak 8,89 ribu jiwa. Salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2020 ini adalah adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2011-2020



Selama periode 2011-2020, persentase penduduk miskin terendah di Kabupaten Magelang terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,67 persen, sedangkan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 15,18 persen. Dalam rentang waktu 10 tahun, pemerintah berhasil mengentaskan 33,26 ribu penduduk miskin, dengan nilai yang berfluktuasi di tiap tahunnya.

Sementara itu, persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan trend penurunan, perkecualian pada tahun 2020. Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin mencapai 16,21 persen, kemudian turun menjadi 11,41 persen pada tahun 2020. Selama periode 2011-2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang selalu lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengkoordinasikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan di daerah, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010, tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mengamanatkan pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, baik provinsi, kabupaten dan kota.

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanggulangan kemiskinan ini dengan menggunakan empat prinsip utama yang konperhensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta pembangunan yang inklusif.

## **PENUTUP**

Penggunaan indikator pembangunan sangat dibutuhkan dalam evaluasi pembangunan, terutama indikator-indikator sosial. Dengan ketersediaan data indikator sosial ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan dalam rangkan mewujudkan pembangunan Kabupaten Magelang yang lebih baik sehingga terwujud masyarakat yang lebih sejahtera.